

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penutup kabinet kerja sehingga tema dan prioritas nasional RKP Tahun 2019 lebih terfokus. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/ nilai, dan pemanfaatan inovasi.
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan.
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari. Hal ini sesuai dengan misi Pertama RPJPD Perubahan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;

5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan industri pariwisata;
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata;
16. Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan.

Pada tahap lima tahun ketiga, prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25. Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka arah kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;

8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi Pertama RPJPD Perubahan dan target sasaran pokok pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk tahun 2018 dan 2019.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2014-2016 sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.1 menunjukkan trend yang meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2014 sebesar Rp44.159,4 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp45.961,5 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp47.853,1 milyar pada tahun 2016.

Tabel III.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.254.204	8.737.857	9.107.468	9.735.812	10.500.073
B. Pertambangan dan Penggalian	6.354.052	6.464.379	6.495.408	6.553.867	6.612.851
C. Industri Pengolahan	10.275.504	10.414.023	10.682.705	11.013.869	11.515.000
D. Pengadaan Listrik dan Gas	34.461	36.449	43.134	51.691	61.947
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.678	8.119	8.567	9.120	9.708
F. Konstruksi	3.551.379	3.748.038	4.005.153	4.360.010	4.759.387
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.105.966	6.354.766	6.681.401	7.115.692	7.592.443
H. Transportasi dan Pergudangan	1.573.349	1.664.350	1.756.056	1.865.729	2.004.698
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.000.562	1.034.807	1.084.581	1.145.101	1.208.997
J. Informasi dan Komunikasi	790.872	848.950	926.884	1.027.450	1.138.929
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	766.646	799.974	858.852	930.652	1.008.455
L. Real Estate	1.413.993	1.454.363	1.507.738	1.570.762	1.672.281
M, N. Jasa Perusahaan	115.692	120.342	120.414	122.281	124.176
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.162.063	2.373.492	2.528.956	2.755.297	3.007.407
P. Jasa Pendidikan	967.552	1.061.848	1.146.371	1.257.264	1.382.613
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	503.757	535.128	560.921	592.108	625.030
R,S,T,U. Jasa Lainnya	281.710	304.577	338.507	377.571	421.142
PDRB	44.159.440	45.961.462	47.853.116	50.484.274	53.645.138

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda

Dilihat dari perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, secara nominal juga nilainya semakin meningkat. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu rata-rata sebesar 22 persen meningkat nilainya dari sebesar Rp10.275,5 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp10.414,0 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp10.682,7 milyar pada tahun 2016. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dominan kedua (19 persen terhadap PDRB) juga mengalami perkembangan yang sama, yaitu dari sebesar Rp8.254,2 milyar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp8.737,9 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp9.107,5 milyar pada tahun 2016.

Sejalan dengan perkembangan kedua sektor di atas, sektor pertambangan dan penggalian sebagai salah satu sektor dominan dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2014 sebesar Rp6.354,1 milyar menjadi sebesar Rp6.464,4 milyar dan Rp6.495,4 milyar pada tahun 2015 dan 2016. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran yang rata-rata berkontribusi sebesar 13 persen terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp6.105,9 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp6.354,8 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp6.681,4 milyar pada tahun 2016.

Dengan demikian, kontribusi dari keempat sektor terhadap PDRB rata-rata sebesar 70 persen atau rata-rata mencapai sebesar Rp33.497,2 milyar, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya rata-rata hanya sebesar 30 persen atau rata-rata sebesar Rp14.355,9 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran, sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2017 dan 2018 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp50.484,3 milyar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp53.645,1 milyar.

Trend peningkatan PDRB sepanjang tahun 2017 dan 2018, diperkirakan masih dipengaruhi oleh trend peningkatan pada sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2014-2016 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2014 sebesar Rp22.405,6 milyar meningkat menjadi sebesar Rp23.704,2 milyar pada tahun 2015 dan sebesar Rp25.087,2 milyar pada tahun 2016.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2014 nilai ekspor mencapai sebesar Rp27.201,5 milyar menurun menjadi sebesar Rp21.880,8 milyar pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp18.187,3 milyar.

Tabel III.2
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.405.560	23.704.163	25.087.193	26.553.695	28.115.052
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	261.768	280.182	305.726	333.578	364.434
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.470.518	4.669.369	4.827.693	5.047.835	5.325.466
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.407.028	9.817.433	10.419.207	11.284.001	12.220.573
5	Perubahan Inventori	884.346	873.741	624.608	636.070	648.441
6	Ekspor Luar Negeri	27.201.531	21.880.821	18.187.321	18.414.864	19.184.900
7	Impor Luar Negeri	1.042.267	1.113.734	(1.713.093)	(1.934.065)	(2.010.848)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(19.429.044)	(14.150.512)	(9.885.539)	(9.850.940)	(10.202.618)
	PDRB	44.159.440	45.961.462	47.853.116	50.483.628	53.643.908

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda

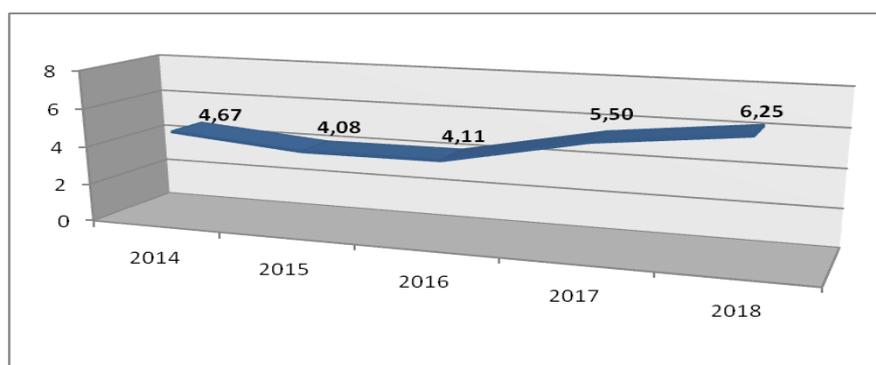
Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2014-2016, yaitu masing-masing sebesar Rp9.407,0 milyar, sebesar Rp9.817,4 milyar dan sebesar Rp10.419,2 milyar. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp4.470,5 milyar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp4.669,4 milyar pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp4.827,7 milyar pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2014-2016 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 cenderung mengalami perlambatan, di mana pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,67 persen menurun menjadi sebesar 4,08 persen pada tahun 2015 dan sedikit meningkat menjadi sebesar 4,11 persen pada tahun 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terjadinya perlambatan ekonomi global dan turunnya harga beberapa komoditas ekspor seperti karet dan CPO. Penurunan harga minyak mentah dunia juga membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber : 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda

Pada tahun 2017 dan 2018, sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.3, laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,50 persen dan 6,26 persen. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,90 persen dan 7,85 persen, diikuti oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan sebesar 3,10 persen dan 4,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 5,86 persen, diikuti oleh investasi yang tumbuh positif sebesar 6,13 persen dan 8,30 persen. Sejalan dengan perbaikan harga komoditas ekspor, komponen ekspor juga diperkirakan akan tumbuh positif sebesar 1,25 persen dan 4,18 persen.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,22	5,86	4,23	6,90	7,85
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,99	1,74	0,48	0,90	0,90
C.	Industri Pengolahan	1,30	1,35	2,58	3,10	4,55
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,29	5,77	18,34	19,84	19,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,95	5,74	5,52	6,45	6,45
F.	Konstruksi	4,00	5,54	6,86	8,86	9,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	4,44	4,07	5,14	6,50	6,70
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,96	5,78	5,51	6,25	7,45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	3,42	4,81	5,58	5,58
J.	Informasi dan Komunikasi	6,85	7,34	9,18	10,85	10,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,26	4,35	7,36	8,36	8,36
L.	Real Estate	7,72	2,86	3,67	4,18	6,46
M, N.	Jasa Perusahaan	7,01	4,02	0,06	1,55	1,55
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,33	9,78	6,55	8,95	9,15
P.	Jasa Pendidikan	7,06	9,75	7,96	9,67	9,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	6,23	4,82	5,56	5,56
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,95	8,12	11,14	11,54	11,54
PDRB		4,67	4,08	4,11	5,50	6,26

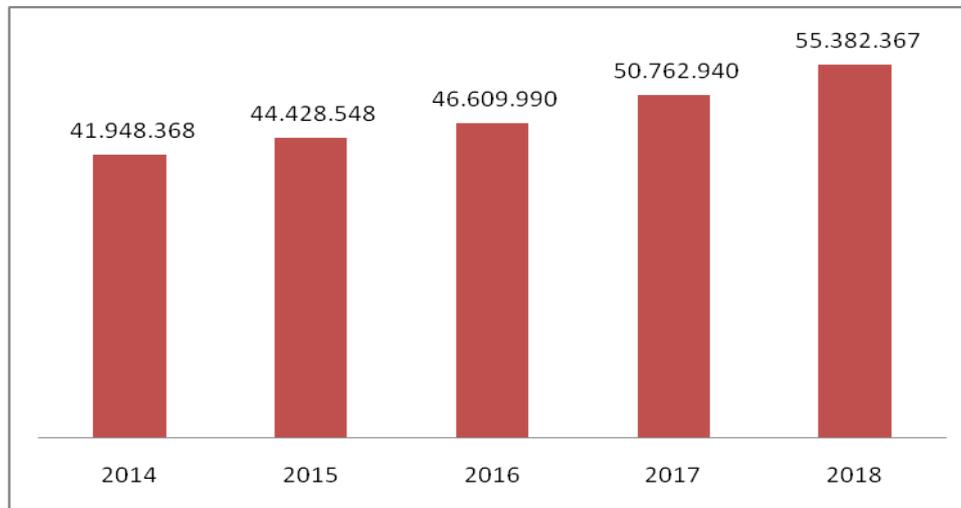
Sumber : 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas

Dalam kurun waktu 2014-2016, sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.2 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB perkapita sebesar Rp41.948.368,- meningkat menjadi sebesar Rp44.428.548,- pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp46.609.990,-. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada tahun 2017-2018 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp50.762.940,- dan sebesar Rp55.382.367,-.

Gambar III.2
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018
(dalam Rupiah)



*Sumber: 2014-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
)2016 - 2018 Proyeksi Bappelitbangda

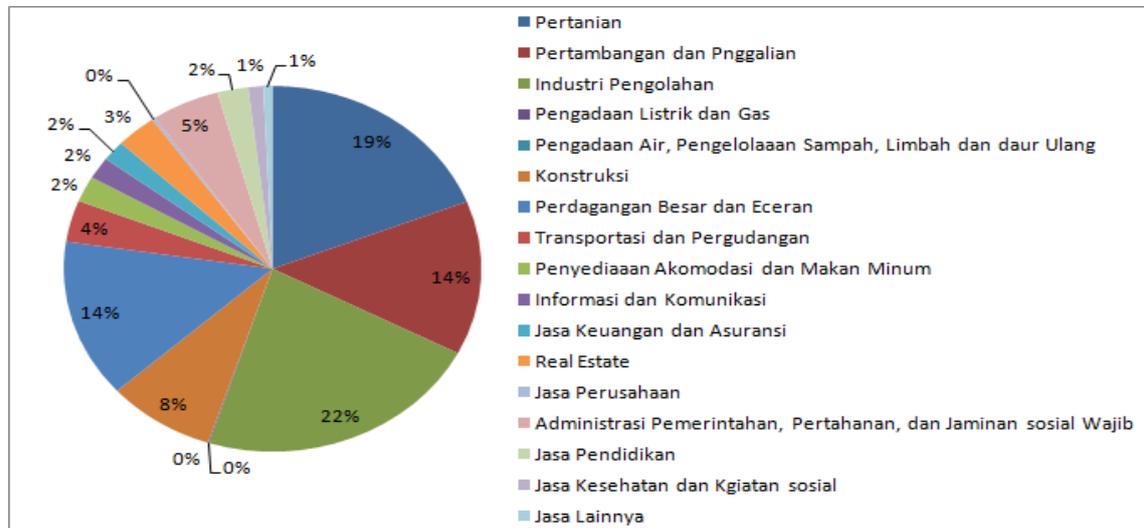
3.1.1.4 Struktur Sektor Ekonomi

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 22,32 persen, namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai sebesar 22,66 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 19,03 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,96 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,57 persen.

Apabila dicermati lebih secara mendalam memperlihatkan bahwa struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami pergeseran struktur dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), bergeser menjadi didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa) dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai sebesar 45,07 persen. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor industri pengolahan) meskipun secara relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun cenderung mengalami peran yang menurun.

Gambar III.3
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2017 dan 2018, diperkirakan struktur perekonomian daerah masih tetap sama seperti yang terjadi pada tahun 2016. Namun sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran relatif dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sekitar 20 persen.

Tabel III.4
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,22	19,68	19,03	19,54	20,08
B.	Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,69	13,57	13,45	12,82
C.	Industri Pengolahan	22,85	21,13	22,32	21,46	20,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,36	8,68	8,37	8,42	8,58
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,43	14,10	13,96	13,89	13,87
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,78	4,04	3,67	3,74	3,79
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,39	2,27	2,23	2,25
J.	Informasi dan Komunikasi	1,51	1,54	1,94	1,97	2,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,78	1,79	1,76	1,82
L.	Real Estate	3,26	3,25	3,15	3,10	3,16
M, N.	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,25	0,26	0,26

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,40	5,78	5,28	5,61	5,78
P.	Jasa Pendidikan	2,42	2,70	2,40	2,52	2,58
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,17	1,17	1,22	1,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,66	0,70	0,71	0,71	0,73
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: 2014-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2017-2018 Proyeksi Bappelitbangda

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2014-2016 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 50 persen, diikuti oleh komponen ekspor dan investasi yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan di atas 20 persen terhadap PDRB. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB di atas 10 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2017 dan 2018 perekonomian masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor dan investasi serta konsumsi pemerintah.

Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2014 – 2018 diperlihatkan pada Tabel III.5 di bawah ini.

Tabel III.5
Ditribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

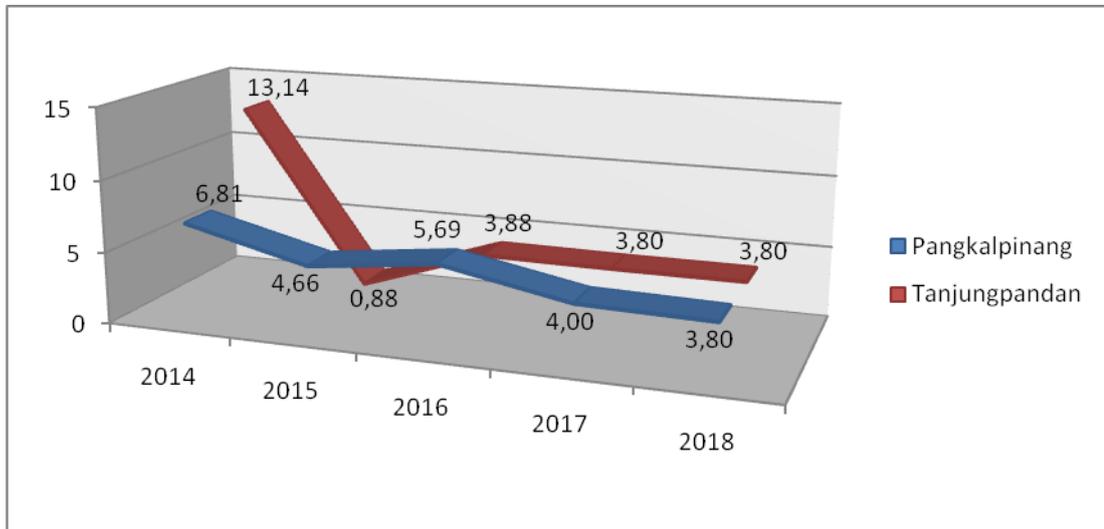
	Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,74	51,57	52,43	52,60	52,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,12	10,16	10,09	10,00	9,93
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,30	21,36	21,77	22,35	22,78
5	Perubahan Inventori	2,00	1,90	1,31	1,26	1,21
6	Ekspor Luar Negeri	62,60	47,61	38,01	36,48	35,76
7	Impor Luar Negeri	(2,36)	(2,42)	(3,58)	(3,83)	(3,75)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(44,00)	(30,79)	(20,66)	(19,51)	(19,02)
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : 2013-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2017 dan 2018 Proyeksi Bappeda

3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2015, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 4,66 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 0,88 persen *year on year* (Desember 2015 terhadap Desember 2014).

Gambar III.4
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-2018



Sumber : 2014-2016 (BPS),
*)2017-2018 (Proyeksi Bappelitbangda)

Tabel III.6
Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2011-2015

Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66
1. Bahan Makanan	-0,50	8,50	11,08	3,39	6,63
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	5,32	7,95	6,82	8,63	7,92
3. Perumahan	7,52	5,81	9,20	8,85	3,74
4. Sandang	8,83	5,79	1,63	6,61	2,60
5. Kesehatan	7,09	5,19	5,08	8,13	5,50
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,73	10,31	3,77	6,56	8,62
7. Transportasi dan Komunikasi	10,55	-0,11	11,17	6,98	-2,04

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2017 dan 2018, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 4,0 - 3,8 persen untuk kota Pangkalpinang dan 3,8 persen untuk kota Tanjungpandan. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar,

pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

Tabel III.7
Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2014-2015

Kelompok Pengeluaran	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Umum	13.14	0.88
1. Bahan Makanan	21.36	-4.52
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6.91	4.63
3. Perumahan	6.87	2.91
4. Sandang	12.03	1.26
5. Kesehatan	4.11	3.87
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15.35	8.07
7. Transportasi dan Komunikasi	20.47	0.42

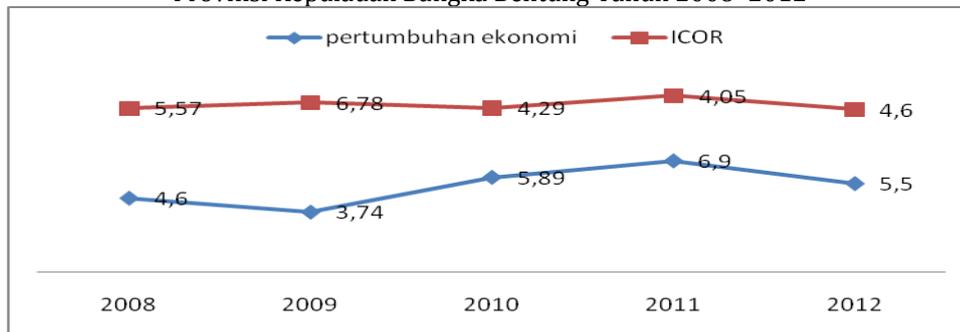
Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016

3.1.1.7 ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital - Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2009 nilai ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,78 sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,74 persen. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2009 kegiatan ekonomi kurang produktif salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi di negara maju. Antara 2009 dengan 2010 terjadi proses perbaikan dari fungsi-fungsi produksi kegiatan ekonomi. Nilai ICOR mulai turun sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,5 persen dengan ICOR sebesar 4,6 persen kondisi ini menggambarkan terjadi perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 6,9 persen dengan ICOR sebesar 4,05.

Gambar III.5
Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Proyeksi angka ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun selanjutnya diharapkan semakin cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makro ekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

ICOR Kepulauan Bangka Belitung menurut sektor dan sub sektor cenderung bervariasi. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian mempunyai ICOR relatif lebih baik dibanding sektor lainnya. Rendahnya angka ICOR sektor pertanian disebabkan oleh proses produksi yang pendek dan kecilnya proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha taninya. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran rendahnya ICOR disebabkan oleh perputaran modal yang cepat dan proses produksi yang sangat pendek khususnya subsektor perdagangan dan restoran. Rendahnya angka ICOR sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh faktor tidak banyaknya investasi baru yang masuk disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan upaya pembatasan ekspor timah.

3.1.1.8 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.033,25 milyar dan investasi PMDN sebesar Rp 1.023,73 milyar. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada tabel III.8.

Tabel III.8
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015

Investasi		2011	2012	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	Jumlah Proyek	48	46	37	60	76
	Nilai (Rp Milyar)	146,05	59,18	81,52	615,45	1.033,25
PMDN	Jumlah Proyek	7	8	9	8	28
	Nilai (Rp Milyar)	514,40	533,46	543,3	615,45	1.023,73

Sumber: BP2TPM, 2015

Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

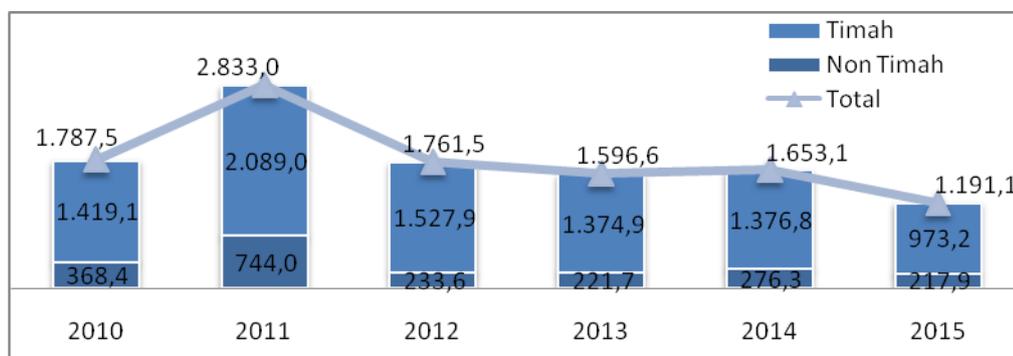
Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.9 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Total ekspor tertinggi sebesar US\$ 2.833,0 Juta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2011 baik dari ekspor logam timah yang sebesar US\$ 2.089,0 Juta maupun ekspor non logam timah yang sebesar US\$ 744,0. Pada tahun 2015 total ekspor bulan Januari s.d. Desember 2015 sebesar US\$ 1.191,1 Juta mengalami penurunan sebesar 27,95 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 sebesar US\$ 1.653,12 juta. Penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya ekspor timah hingga 29,31 persen dari US\$ 1.376,78 Juta menjadi US\$ 973,19 Juta dan ekspor non timah sebesar 21,16 persen dari US\$ 276,34 Juta menjadi US\$ 217,87 juta.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 s.d. 2015, sebagaimana tersaji pada gambar III.6 dan III.7 berikut ini.

Gambar III. 6
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010- 2015 (dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar US\$ 91,60 Juta dimana impor non migas sebesar US\$ 73,00 Juta dan impor Migas sebesar US\$ 18,60 Juta. Pada tahun 2015 total impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga bulan Desember 2015 sebesar US\$ 49,89 juta turun 15,38 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 yang sudah mencapai US\$ 58,96 juta. Penurunan nilai impor tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor non migas hingga mencapai 52,75 persen yaitu US\$ 38,70 juta menjadi sebesar US\$ 18,29 juta dan impor migas mengalami peningkatan sebesar 56,01 persen yaitu US\$ 20,26 juta menjadi sebesar US\$ 31,60 juta.

Gambar III. 7
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2015 (dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. TPT pada 2014 sebesar 5,14 persen meningkat menjadi sebesar 6,29 persen pada 2015. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017*)	2018*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	6,29	6,17	5.10	4,50

Sumber : 2014 – 2016 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)

*) 2017 - 2018 Proyeksi Bappelitbangda

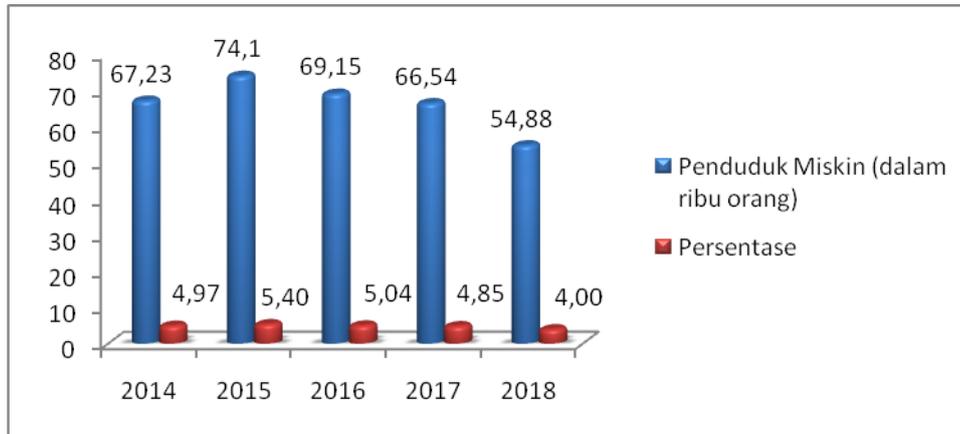
Pada tahun 2017 dan 2018, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *rowmaterials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh dan berkembang yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2014 - 2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 67,23 ribu jiwa atau sebanyak 4,97 persen dari total jumlah penduduk, meningkat menjadi 74,1 ribu jiwa atau 5,40 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebanyak 69,15 ribu jiwa atau sebanyak 5,04 persen pada tahun 2016.

Gambar III.8
Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018



Sumber : 2014 – 2016 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung
*) 2017 – 2018 (Proyeksi Bappelitbangda)

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2017 dan 2018 terus mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah $0 < IW < 1$

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 berfluktuasi sepanjang tahun 2011-2015 dan kembali ke angka 0,291 pada tahun 2015. Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel

III.10. Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2016 IW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat turun menjadi sebesar 0,288, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.10
Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012–2016)

Tahun	Indeks Ketimpangan Willamson
(1)	(2)
2012	0,284
2013	0,304
2014	0,294
2015 *)	0,291
2016 *)	0,288

Sumber: 2012-2014 (BPS.Ri)

*) 2015-2016 (Proyeksi Bappeda)

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Tabel III.11
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013–2017)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2013	0,31
2014	0,30
2015	0,27
2016*)	0,268
2017*)	0,265

Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015

*) 2016 - 2017 Proyeksi Bappeda

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 adalah sebesar 0,31, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,30. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi

dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,27, angka tersebut merupakan paling dan pada tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 0,29 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan berasal dari pelemahan ekonomi China. Dengan pelemahan tersebut akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih belum seutuhnya terlepas dari tantangan pada 2017 akibat harga minyak dunia yang belum bisa diprediksi, kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih serta dampak kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump (efek Trump) yang juga mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Namun demikian, melemahnya perekonomian global mendapatkan response yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai Negara tujuan investasi dunia, tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Tetapi, di sisi lain perlu diwaspadai bahwa dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam menjawab tantangan perekonomian global, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat perekonomian domestik. Faktor integral yang menentukan kekuatan ekonomi domestik Indonesia antara lain adalah: 1) pengelolaan konsumsi yang efektif; 2) pengetuan sektor pangan; 3) penggunaan energi yang efisien; 4) Investasi dan perdagangan Internasional. Keempat faktor tersebut bersifat komplementer, sehingga penanganannya harus simultan dan terkoordinasi dengan baik.

Pada intinya, kelemahan-kelemahan di sektor daya saing, rendahnya kapasitas produksi pangan, minimnya penguasaan R&D dan inovasi serta faktor politis yang terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu segera dibenahi. Sementara, kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah, momentum untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, serta aspek demografis dan kemajemukan bangsa, perlu terus dipertahankan guna mendorong berbagai kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, pangan dan kerjasama internasional yang efektif.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019

Pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;
4. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terus menerus;
5. Kapasitas pengolahan CPO yang ada di Kepulauan Bangka Belitung relatif masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun distribusi yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lain yang mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 juga mencakup tantangan terkait dengan persaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi antara lain:

- 1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk lokal akan semakin terpinggirkan.
- 2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
- 3) Pengembangan sektor unggulan Kepulauan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.
- 4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaganya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.

- 5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- 7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah. Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.
- 8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-privatepartnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 antara lain adalah:

- 1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019.
- 2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.

- 3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
- 4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2017 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2017 dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain :

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
- 3) Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil,fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
- 4) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- 5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
- 6) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

- 7) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
- 8) Pengembangankemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat

distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas : a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.12

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016 (N-3)	Realisasi Tahun 2017 (N-2)	Tahun Berjalan 2018 (N-1)	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019 (N)	Proyeksi / Target pada Tahun 2020 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	574.258.443.819,77	710.027.462.801,58	776.196.230.613,87	672.622.971.670,14	706.254.120.253,65
1.1.1	Pajak daerah	507.983.460.531,72	629.136.457.212,39	649.190.101.400,00	595.380.853.624,27	625.149.896.305,48
1.1.2	Retribusi daerah	8.651.866.891,72	5.434.540.818,00	23.810.905.014,87	9.694.635.104,69	10.179.366.859,92
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.613.342.582,77	5.306.417.427,05	8.500.000.000,00	6.579.130.804,16	6.908.087.344,37
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	52.009.773.813,56	70.150.047.344,14	94.695.224.199,00	60.968.352.137,04	64.016.769.743,89
1.2	Dana perimbangan	1.126.284.913.345,00	1.537.241.446.289,00	1.684.392.043.000,00	1.611.576.859.879,29	1.692.155.702.873,26
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	142.860.016.345,00	120.836.218.678,00	187.759.686.000,00	167.442.880.412,53	175.815.024.433,16
1.2.2	Dana alokasi umum	905.526.208.000,00	980.297.314.000,00	1.018.673.218.000,00	1.061.324.029.520,37	1.114.390.230.996,39
1.2.3	Dana alokasi khusus	77.898.689.000,00	436.107.913.611,00	477.959.139.000,00	382.809.949.946,40	401.950.447.443,72
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	249.323.167.102,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	150.000.000,00	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248.716.400.000,00	-	-	-	-
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	26.700.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	430.067.102,00	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.949.866.524.266,77	2.386.297.015.485,16	2.490.588.273.613,87	2.284.199.831.549,44	2.398.409.823.126,91

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
- 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah :

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan *SamsatOutlet*;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalandengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
 - c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
 - g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :
- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
 - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
 - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.13.

Tabel III.13

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016 (N-3)	Realisasi Tahun 2017 (N-2)	Tahun Berjalan 2018 (N-1)	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019 (N)	Proyeksi pada Tahun 2020 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.209.394.930.768,63	1.330.060.091.341,26	1.632.413.906.367,34	1.418.221.861.515,90	1.489.132.954.591,70
2.1.1	Belanja pegawai	396.188.131.149,20	620.837.204.568,21	679.784.535.748,41	464.300.280.710,03	487.515.294.745,53
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	812.500.000,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	403.743.237.430,00	254.263.301.000,00	326.898.679.969,00	473.242.284.272,97	496.904.398.486,62
2.1.5	Belanja bantuan sosial	717.060.000,00	700.000.000,00	718.910.000,00	838.368.974,43	880.287.423,15
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	156.076.110.183,43	351.012.561.851,05	331.112.656.477,93	182.935.216.372,99	192.081.977.191,64
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	251.916.010.142,00	102.528.477.024,00	287.998.044.172,00	295.259.750.742,70	310.022.738.279,84
2.1.8	Belanja tidak terduga	754.381.864,00	718.546.898,00	5.088.580.000,00	1.645.960.442,79	1.728.258.464,93
2.2	Belanja Langsung	860.473.361.617,69	1.033.911.965.361,21	1.242.499.834.912,00	1.024.390.366.057,34	1.692.155.702.873,26
2.2.1	Belanja pegawai	99.601.380.686,93	144.404.919.330,00	47.899.241.400,00	116.554.581.341,42	175.815.024.433,16
2.2.2	Belanja barang dan jasa	531.095.000.241,86	520.065.866.581,24	786.575.861.306,00	638.960.752.989,09	1.114.390.230.996,39
2.2.3	Belanja modal	229.776.980.688,90	369.441.179.449,97	408.024.732.206,00	268.875.031.726,83	401.950.447.443,72
	Jumlah Belanja Daerah	2.069.868.292.386,32	2.363.972.056.702,47	2.874.913.741.279,34	2.442.612.227.573,24	2.398.409.823.126,91

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2019 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah,
 - d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2017-2025, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.14, diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2019;
- 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel III.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016 (N-3)	Realisasi Tahun 2017 (N-2)	Tahun Berjalan 2018 (N-1)	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2019 (N)	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	384.325.467.665,47	158.412.396.023,80	166.333.015.824,99
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	384.325.467.665,47	158.412.396.023,80	166.333.015.824,99
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	384.325.467.665,47	158.412.396.023,80	166.333.015.824,99
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	384.325.467.665,47	158.412.396.023,80	166.333.015.824,99